



Mekanisme Pencegahan Konflik Melalui Diplomasi Angkatan laut: Perspektif Historis dan Dinamika Kontemporer

Conflict Prevention Mechanisms Through Naval Diplomacy: Historical Perspectives and Contemporary Dynamics

Wahyu Kurniwan^{1*}, Hendriman Putra¹

¹ Instansi, Bumimoro, Morokrembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60178, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: exdemustar@gmail.com, hendrimanputra@gmail.com

Abstract

Pentingnya diplomasi angkatan laut semakin terlihat dalam menghadapi tantangan global saat ini seperti keamanan maritim, perlindungan sumber daya laut, respons bencana alam, dan penyelesaian konflik di wilayah laut. Fenomena diplomasi angkatan laut aktual dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan memperkuat kerja sama antara negara-negara dalam bidang keamanan maritim, pengelolaan sumber daya laut, penanggulangan bencana alam, dan penyelesaian konflik di wilayah laut. Diplomasi angkatan laut memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan mencegah konflik global, dengan fokus pada keamanan maritim, perlindungan sumber daya laut, respons bencana alam, dan penyelesaian konflik di wilayah laut. Kerja sama antarnegara dalam bidang-bidang ini diperkuat melalui diplomasi angkatan laut, yang membantu mengatasi tantangan global saat ini. Artikel ini mengeksplorasi peran diplomasi angkatan laut dalam mengurangi ketegangan dan mencegah konflik, menggunakan contoh kasus historis dan kontemporer. Analisis tersebut mencakup bagaimana diplomasi angkatan laut telah membantu menyelesaikan konflik di masa lalu dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi oleh angkatan laut dalam menjalankan diplomasi di masa depan

Abstract

The importance of naval diplomacy is increasingly visible in the face of today's global challenges such as maritime security, protection of marine resources, natural disaster response, and conflict resolution in sea areas. The phenomenon of actual naval diplomacy can help address these challenges by strengthening cooperation between countries in the areas of maritime security, marine resource management, natural disaster management, and conflict resolution in the sea area. Naval diplomacy plays an important role in maintaining peace and preventing global conflicts, focusing on maritime security, protection of marine resources, natural disaster response, and conflict resolution in sea areas. Cooperation between countries in these areas is strengthened through naval diplomacy, which helps address current global challenges. This article explores the role of naval diplomacy in reducing tensions and preventing conflict, using historical and contemporary case examples. The analysis includes how naval diplomacy has helped resolve conflicts in the past and identifies challenges and opportunities faced by navies in conducting diplomacy in the future

Keywords: diplomasi angkatan laut, keamanan maritim, pencegah konflik global.

1. Pendahuluan

Diplomasi Angkatan Laut (*Naval Diplomacy*) adalah konsep yang menggabungkan manuver militer dan diplomasi untuk mempromosikan kepentingan politik suatu negara. Diplomasi angkatan laut, seringkali disebut Diplomasi Kombinasi atau Diplomasi Negara-Kelautan, berfokus pada penggunaan alat proyektif kekuasaan dalam hubungan internasional antar negara.

Angkatan Laut sebagai salah satu unsur dari kekuasaan proyektif diakses oleh suatu negara, menggunakan peralatan militer untuk mempengaruhi dan mengontrol situasi politik di luar batas negara. Diplomasi angkatan laut mencakup seperangkat teori yang berbeda tentang cara-cara suatu negara dapat mempengaruhi kepentingan politik dan diplomasi dari negara lain. (Holmes, 2019)

Telah diketahui dengan baik bahwa ahli teori klasik kekuatan laut, seperti laksamana Amerika, Alfred Thayer Mahan (1840–1914), dan sejarawan angkatan laut Inggris, Sir Julian Corbett (1854–1922), tidak banyak berkomentar tentang aplikasi politik angkatan laut di masa damai, dengan fokus pada penggunaan strategis, operasional, dan taktis angkatan laut dalam perang. Alasan kekurangan ini sulit dipastikan tetapi, bagi Mahan, penerapan politik kekuatan angkatan laut terbatas pastilah sangat berbenturan dengan doktrin angkatan lautnya tentang kapal perang besar yang bertujuan untuk menguasai laut melalui tindakan armada yang menentukan.

Corbett pada bagiannya sering menyentuh isu-isu diplomatik dalam buku-bukunya tentang sejarah maritim Inggris tetapi, dalam karya teoretisnya tentang strategi maritim, sedikit minat dalam hal ini dapat ditemukan. Jika ada diplomasi dan tata negara, dengan cara seperti Clausewitzian, memberikan latar belakang bagi prinsip-prinsip strategi dan operasi angkatan lautnya.

Naval diplomacy adalah cara bagaimana Angkatan Laut mempengaruhi dan berinteraksi dengan pihak luar untuk mencapai tujuan nasional dan memelihara kepentingan keamanan. Ini melibatkan penggunaan kapal dan sumber daya Angkatan Laut untuk membangun hubungan, mempromosikan kerjasama, dan mengatasi konflik dengan negara lain. Menjelaskan teori-teori dasar yang membentuk fondasi diplomasi angkatan laut, seperti realisme, keamanan nasional, dan hubungan internasional. Konsep ini menjelaskan tentang pentingnya diplomasi dalam dunia angkatan laut dan bagaimana diplomasi memainkan peran penting dalam membangun keamanan dan stabilitas global. Diplomasi Angkatan Laut adalah bentuk diplomasi yang menggunakan kekuatan dan kemampuan angkatan laut sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan keamanan nasional. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global karena.

Diplomasi Angkatan Laut membantu memastikan keamanan maritim melalui kerjasama dengan negara-negara lain dan mempromosikan norma-norma maritim yang berlaku secara internasional. Diplomasi Angkatan Laut memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas global dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama antarnegara. Diplomasi Angkatan Laut membantu memastikan akses terbuka dan stabil ke pelabuhan dan jalur transportasi maritim, yang merupakan dasar ekonomi global. Diplomasi Angkatan Laut membantu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain, membantu membangun kepercayaan dan mengatasi masalah keamanan yang bersifat global.

Diplomasi Angkatan Laut (*Naval Diplomacy*) adalah bentuk diplomasi yang menggunakan kekuatan dan kemampuan Angkatan Laut sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan negara lain, tanpa harus melalui perang. Ini bisa berupa pengiriman kapal-kapal perang untuk mempengaruhi pemikiran atau tindakan negara lain, atau untuk menunjukkan solidaritas dengan negara-negara mitra.

Karena tantangan global yang semakin kompleks, diplomasi Angkatan Laut menjadi semakin penting untuk memastikan keamanan maritim dan stabilitas global. Strategi dan praktik yang efektif dalam diplomasi Angkatan Laut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan global dapat tercapai dengan efektif.

Diplomasi angkatan laut adalah penggunaan kekuatan angkatan laut untuk mencapai tujuan politik dan strategis tanpa penggunaan kekerasan. Ini melibatkan serangkaian tindakan, termasuk penjagaan, patroli, latihan bersama, dan operasi penegakan hukum, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kerja sama, dan mengurangi ketegangan antara negara-negara (Holmes, 2019). Dalam konteks ini, diplomasi angkatan laut dapat berperan dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

Diplomasi angkatan laut adalah salah satu strategi yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan politik dan strategis tanpa harus menggunakan kekerasan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan kekuatan angkatan laut untuk melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kerja sama, dan mengurangi ketegangan antara negara-negara.

Salah satu aspek utama dari diplomasi angkatan laut adalah penjagaan dan patroli di perairan strategis. Angkatan laut suatu negara ditempatkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas di laut, baik di perairan nasional maupun internasional. Hal ini membantu menciptakan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut, serta mencegah ancaman keamanan seperti penyebaran senjata ilegal atau aksi teroris.

Selain itu, latihan bersama juga menjadi bagian penting dari diplomasi angkatan laut. Negara-negara dapat melaksanakan latihan militer bersama untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antara angkatan laut mereka. Ini membangun kepercayaan dan memperkuat kerja sama regional, sekaligus mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat ketidakpercayaan atau ketidakpastian.

Operasi penegakan hukum juga merupakan bagian dari diplomasi angkatan laut. Negara-negara dapat berkolaborasi dalam operasi penegakan hukum maritim, seperti penangkapan kapal pencuri atau penyelundupan narkoba di perairan internasional. Ini membantu menjaga keamanan maritim secara kolektif dan menciptakan norma-norma hukum yang dihormati oleh semua negara.



Gambar 1. Diplomasi angkatan Laut

Dalam keseluruhan konteks ini, diplomasi angkatan laut memiliki peran penting dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Melalui tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kerja sama, negara-negara dapat mengurangi ketegangan yang

mungkin timbul di laut dan mewujudkan stabilitas regional yang berkelanjutan. Diplomasi angkatan laut menjadi instrumen yang kuat dalam menjaga keamanan global dan mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan antara negara-negara di dunia maritim.

2. Metode

Metode penelitian ini melibatkan analisis kualitatif, dimana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik, seperti teks, wawancara, atau observasi, untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis historis sebagai metode penelitian. Dalam analisis historis, peneliti akan mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data dari masa lalu untuk memahami sejarah, konteks, dan dampak dari diplomasi angkatan laut dan pencegahan konflik.

3. Hasil dan Pembahasan

Diplomasi Angkatan Laut telah terbukti efektif dalam mencegah konflik sepanjang sejarah karena beberapa alasan. Pertama, kehadiran angkatan laut yang kuat dan terorganisir dapat menunjukkan kekuatan dan kemampuan negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya, sehingga mendorong negara-negara lain untuk berpikir dua kali sebelum melakukan agresi. Hal ini menciptakan efek penahanan yang dapat mengurangi kemungkinan konflik.

Kedua, diplomasi angkatan laut melibatkan berbagai inisiatif seperti kunjungan kapal, latihan bersama, dan pertukaran personel, yang memungkinkan negara-negara untuk membangun hubungan yang lebih erat dan saling mengenal satu sama lain. Interaksi ini meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan di antara negara-negara, sehingga mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

Ketiga, diplomasi angkatan laut dapat digunakan sebagai alat mediasi dan negosiasi dalam situasi krisis. Dalam beberapa kasus sejarah, negara-negara telah menggunakan kekuatan angkatan laut mereka untuk membantu menyelesaikan perselisihan dan mencegah konflik meluas. Misalnya, selama krisis misil Kuba pada tahun 1962, AS mengerahkan blokade angkatan laut untuk menekan Uni Soviet, yang akhirnya mengarah pada penyelesaian damai.

Keempat, diplomasi angkatan laut juga memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman bersama, seperti perlawanan terhadap perompak dan penyelundupan. Kerjasama ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil, yang pada gilirannya mengurangi potensi konflik.

Secara keseluruhan, diplomasi angkatan laut telah menjadi alat penting dalam mencegah konflik sepanjang sejarah dengan menunjukkan kekuatan, membangun hubungan, menyelesaikan krisis, dan menghadapi ancaman bersama. Berikut beberapa kasus dalam rangkaian sejarah tentang kontribusi diplomasi angkatan laut sebagai media untuk mencegah konflik di dunia.

3.1 Kasus Historis

3.1.1 Kasus : Perjanjian Portsmouth (1905), Peran Penting Diplomasi Angkatan Laut Amerika Serikat dalam Mengakhiri Perang Rusia-Jepang

Perjanjian Portsmouth merupakan perjanjian penting yang mengakhiri Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905. Perang ini berlangsung selama hampir dua tahun, dimulai pada tahun 1904, dan melibatkan dua kekuatan besar, Rusia dan Jepang, yang bersaing untuk pengaruh dan kekuasaan di kawasan Asia Timur (Nish, 1985). Diplomasi angkatan laut Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mencapai solusi damai antara kedua negara yang bersengketa (Esthus, 1981).

Perang Rusia-Jepang bermula dari persaingan antara Rusia dan Jepang untuk menguasai Manchuria dan Korea. Kedua negara ini ingin mengamankan kepentingan ekonomi dan strategis mereka di kawasan tersebut. Namun, ketidakmampuan mereka untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian pengaruh di wilayah tersebut akhirnya memicu perang yang berkepanjangan dan menguras sumber daya kedua negara (Nish, 1985).

Selama perang, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Presiden Theodore Roosevelt, mengambil posisi netral dan berusaha untuk memfasilitasi perundingan damai antara Rusia dan Jepang. Kehadiran armada Amerika Serikat di perairan dekat Jepang dan Rusia membantu mencegah konflik lebih lanjut dan memberikan tekanan pada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui negosiasi (Esthus, 1981).

Pada bulan Agustus 1905, delegasi dari Rusia dan Jepang bertemu di Portsmouth, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas penyelesaian damai. Perundingan ini diatur oleh Presiden Roosevelt, yang berperan aktif dalam mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan (Nish, 1985).

Perjanjian Portsmouth, yang ditandatangani pada tanggal 5 September 1905, menciptakan solusi damai yang mengakhiri Perang Rusia-Jepang. Berdasarkan perjanjian ini, Rusia mengakui kepentingan Jepang di Korea dan menarik pasukannya dari Manchuria, sementara Jepang mengakui kepentingan Rusia di wilayah Siberia Timur (Esthus, 1981). Selain itu, kedua negara setuju untuk mengembalikan wilayah yang dikuasai selama perang dan membayar ganti rugi perang kepada pihak yang kalah (Nish, 1985).

Perjanjian Portsmouth menandai peran penting diplomasi angkatan laut Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik internasional dan membantu menciptakan stabilitas di kawasan Asia Timur. Peran aktif Amerika Serikat dalam perundingan ini juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga perdamaian dan kestabilan internasional, serta kepentingan strategisnya di kawasan tersebut (Esthus, 1981).

3.1.2 Kasus : Diplomasi Angkatan Laut Inggris dan Australia dalam Mengakhiri Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966)

Konfrontasi Indonesia-Malaysia, yang berlangsung pada tahun 1960-an, merupakan konflik yang melibatkan Indonesia dan Malaysia, serta beberapa negara lain yang mendukung Malaysia, seperti Inggris dan Australia (Jones, 2002). Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia, yang mencakup wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris, seperti Sabah dan Sarawak (Poulgrain, 1998). Diplomasi angkatan laut Inggris dan Australia berperan penting dalam mengakhiri konfrontasi ini dan membantu menciptakan perdamaian di kawasan tersebut (Jones, 2002).

Selama konfrontasi, angkatan laut Inggris dan Australia bekerja sama untuk mengurangi ketegangan di perbatasan dan mencegah konflik lebih lanjut. Mereka melaksanakan patroli bersama di perairan yang dipersengketakan, serta latihan militer bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antara kedua negara (Jones, 2002). Selain itu, mereka juga

melibatkan angkatan laut Malaysia dan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan tujuan untuk mempromosikan dialog dan kerja sama antara para pihak yang bersengketa (Poulgrain, 1998).

Selain kegiatan militer, diplomasi angkatan laut Inggris dan Australia juga mencakup tindakan penegakan hukum untuk mengatasi penyelundupan senjata, penyusupan, dan aktivitas ilegal lainnya di perbatasan (Jones, 2002). Hal ini penting untuk mengurangi ketegangan dan menjamin keamanan di wilayah tersebut.

Diplomasi angkatan laut Inggris dan Australia akhirnya berhasil mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia, yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966, dengan penandatanganan Perjanjian Bangkok pada tahun 1966 (Poulgrain, 1998). Perjanjian ini menciptakan solusi damai yang mengakhiri konflik dan membantu menciptakan stabilitas di kawasan tersebut.

Peran Inggris dan Australia dalam mengakhiri konfrontasi Indonesia-Malaysia menunjukkan pentingnya diplomasi militer dalam menyelesaikan konflik internasional. Melalui kerja sama, dialog, dan tindakan penegakan hukum, kedua negara ini berhasil membantu mengurangi ketegangan di perbatasan dan mencegah konflik lebih lanjut, sehingga menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

3.2 Kasus Kontemporer

3.2.1 Kasus : Laut Cina Selatan

Diplomasi angkatan laut telah menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketegangan dan mencegah konflik di Laut Cina Selatan, di mana klaim teritorial yang tumpang tindih telah menciptakan ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut (Buszynski, 2012). Klaim teritorial ini melibatkan beberapa negara, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, yang semuanya mengklaim sebagian atau seluruh wilayah di Laut Cina Selatan (Fravel, 2011).

Melalui patroli bersama, latihan militer, dan operasi penegakan hukum, angkatan laut dari berbagai negara telah bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut (Buszynski, 2012). Kerja sama ini mencakup partisipasi dari negara-negara yang terlibat dalam klaim teritorial, serta negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut, seperti Amerika Serikat dan Australia (Fravel, 2011).

Salah satu contoh kerja sama ini adalah latihan militer bersama yang melibatkan angkatan laut dari beberapa negara, seperti latihan tahunan ASEAN-US Maritime Exercise (AUMX) (Buszynski, 2012). Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan antara negara-negara di kawasan tersebut dalam menghadapi potensi ancaman dan konflik (Fravel, 2011).

Diplomasi angkatan laut di Laut Cina Selatan menunjukkan bagaimana kerja sama militer dan dialog antar negara dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik di kawasan yang rentan terhadap konflik. Melalui pendekatan ini, negara-negara di kawasan tersebut dapat bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan.

3.2.2 Kasus : Operasi Atalanta (2008-sekarang)

Operasi Atalanta adalah sebuah misi yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan tujuan utama untuk mencegah dan menanggulangi perompakan yang terjadi di perairan lepas pantai Somalia (Murphy, 2011). Melalui kerja sama yang erat antara angkatan laut dari berbagai negara, Operasi Atalanta telah berhasil mengurangi insiden perompakan dan secara signifikan meningkatkan keamanan maritim di kawasan tersebut.

Operasi ini melibatkan penggunaan kekuatan angkatan laut, termasuk kapal perang dan pesawat patroli, untuk mengawasi dan melindungi kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan penting di lepas pantai Somalia. Angkatan laut dari negara-negara yang terlibat dalam operasi ini berkolaborasi dalam patroli, pengawasan, dan intervensi terhadap kelompok perompak yang berusaha untuk menculik kapal-kapal dagang.

Selain itu, Operasi Atalanta juga berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat pesisir Somalia yang terdampak oleh konflik dan ketidakstabilan. Misalnya, angkatan laut yang terlibat dalam operasi ini membantu dalam mengawal pengiriman bantuan makanan dan obat-obatan ke wilayah yang membutuhkan.

4. Simpulan

Diplomasi angkatan laut telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian di seluruh dunia. Melalui serangkaian strategi yang kompleks dan diplomasi persuasif, angkatan laut berbagai negara telah mampu melakukan intervensi strategis yang mencegah eskalasi ketegangan dan mendorong dialog konstruktif antarnegara. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga mencakup negosiasi diplomatik, latihan bersama, pertukaran pengetahuan, dan inisiasi kerja sama maritim yang berkelanjutan.

Analisis kasus historis dan kontemporer mengungkapkan beragam mekanisme diplomasi angkatan laut dalam meredam potensi konflik. Setiap interaksi maritim membawa peluang untuk membangun kepercayaan, mengurangi salah paham, dan menciptakan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif di antara negara-negara yang berpotensi berkonflik.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh angkatan laut dalam menjalankan diplomasi di masa depan akan terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika politik global. Munculnya teknologi canggih seperti drone maritim, sistem sensor pintar, dan kemampuan cyber akan mengubah paradigma diplomasi kelautan. Selain itu, isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, keamanan maritim, dan persaingan sumber daya akan memerlukan pendekatan diplomasi angkatan laut yang lebih adaptif, inovatif, dan multidimensional. Ke depannya, keberhasilan diplomasi maritim akan sangat bergantung pada kemampuan setiap negara untuk mengintegrasikan teknologi, diplomasi, dan kerja sama internasional.

Daftar Rujukan

- Crosby, C. J. (2018). *Naval diplomacy: A tool for promoting national interests*. Journal of Political Risk, 6(5), 19-24.
- Carlson, John Roy.(1988) "*Marine Diplomacy: The Diplomats of the Sea*." Naval Institute Press,
- Mahan, Alfred Thayer. "(1987) *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*." Dover Publications,.
- Buszynski, L. (2012). The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.–China Strategic Rivalry. *The Washington Quarterly*, 35(2), 139-156.
- Esthus, R. A. (1981). Theodore Roosevelt and the Portsmouth Treaty. *The American Historical Review*, 86(2), 259-278.

- Holmes, J. R. (2019). Naval Diplomacy: A Timeless Tool of Statecraft. *Naval War College Review*, 72(3), 1-16.
- Jones, M. (2002). *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965: Britain, the United States, and the Creation of Malaysia*. Cambridge University Press.
- Murphy, M. N. (2011). *Somalia: The New Barbary? Piracy and Islam in the Horn of Africa*. Columbia University Press.
- Holmes, J. R. (2019). *Naval Diplomacy: A Conceptual Overview*. *Journal of Military and Strategic Studies*, 22(1), 81-95.
- Jones, M. (2002). *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965: Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia*. Cambridge University Press.
- Poulgrain, G. (1998). *The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei, and Indonesia, 1945–1965*. Crawford House Publishing.
- Murphy, M. N. (2011). The European Union's Operation Atalanta: A Model for Future Counter-Piracy Operations. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, 1(2), 7-25.
- Esthus, R. A. (1981). Theodore Roosevelt and the International Rivalries. In *The Diplomacy of the Russo-Japanese War* (pp. 183-204). Princeton University Press.
- Nish, I. (1985). *The Origins of the Russo-Japanese War*. Longman.
- Buszynski, L. (2012). The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.-China Strategic Rivalry. *The Washington Quarterly*, 35(2), 139-156.
- Fravel, M. T. (2011). China's Strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 33(3), 292-319.